

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Ruslan, *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2011

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2010.

Binsar m Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.

Dr. Sunaryati Hartono, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, 1976.

Jimmy Asshiddiqia, *Perihal Undang Undang*, PT. Raja Grafinso Persada, Jakarta, 2011.

Jimmy Asshiddiqia, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekjen &Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006

Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, Ghalia, 2012.

Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Mardjono reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*, pidato pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum UI, 1993.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Satjipto rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, cetakan keenam, 2006.

Satjipto rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (catatan kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum)*, Buku Kompas, Jakarta , 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, cetakan keempat, 2011

Yesmil Anwar, Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)* , Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedua, 2001.

Zainal Arifin Hoesein, *Yudisial Review di MA, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
7. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
8. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
10. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa.

SUMBER LAIN :

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 51/Pid.B/2009/PN.Amg, tanggal 09 Desember 2009.
2. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor:19/PID/2010 /PT.MDO tanggal 11 Maret 2010.
3. Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 446 K/Pid/2011 tanggal 27 Mei 2011
4. Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, 2008, *Studi tentang Ijin Pemeriksaan Terhadap Pejabat Negara dalam Proses Penegakan Hukum.*
5. Allen ,1958 dikutip oleh [Http://rudini76ban.wordpress.com/2010/01/28/pemikiran-teori-hukum-murni](http://rudini76ban.wordpress.com/2010/01/28/pemikiran-teori-hukum-murni).
6. M.elsan.or.id “ Konferensi Negara Hukum dan HAM, 9 Okt 2012, Hotel Bidakara, Jakarta.

LAMPIRAN HASIL PENELITIAN